

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan di mana kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan. Terlebih pemerintah memiliki banyak instansi atau lembaga untuk membantu tugasnya, salah satunya adalah Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) yang dibantu oleh Unit Pengelola Kegiatan Perguliran (UPKP) untuk menjalankan program PNPM Mandiri Pedesaan. Program ini ditujukan untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat, serta membantu masyarakat agar lebih sejahtera.

Banyak pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengentasan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, bahkan pemerintah telah mengidentifikasi masalah kemiskinan di setiap daerah dengan potensi masalah yang berbeda. Dalam permasalahan ini, terdapat sebuah indikator yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan yang dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat khususnya dari kalangan rumah tangga (Khomsan, 2015).

Salah satu program atau kebijakan yang sempat dibentuk serta dijalankan secara langsung oleh pemerintah pusat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan di daerahnya masing-masing. Melalui program ini, masyarakat dibina agar mampu mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya secara mandiri (Rizkina, 2020).

Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah inisiatif pengentasan kemiskinan yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengelola pembangunan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengatasi permasalahan terkait peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan program PNPM Mandiri akan memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (Eriyasti, 2015).

Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM Mandiri) telah diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Pengenalan resmi PNPM Mandiri terjadi pada tahun 2007. Program ini mencakup PNPM Mandiri Pedesaan, sebuah program pembangunan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi langsung dalam program PNPM Mandiri didorong mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan di daerah pedesaan. Melalui program PNPM Mandiri khususnya di wilayah pedesaan, tentunya akan memberdayakan masyarakat secara mandiri untuk meningkatkan perekonomiannya (Bancin, 2011).

Semenjak tahun 2014, pasca masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, program PNPM Mandiri resmi dihentikan secara nasional. Namun, keberlanjutannya dijalankan oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) di bawah Unit Pengelola Kegiatan Perguliran (UPKP). Adapun program yang dijalankan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Anggota BKAD dan UPKP itu sendiri merupakan anggota yang sudah ada dan ada beberapa penambahan anggota baru, adapun ketua BKAD dipilih

langsung oleh kepala desa dan aparaturnya melalui kesepakatan antar desa di suatu wilayah dalam satu kecamatan seperti yang terdapat di Kecamatan Permata dan untuk Unit Pengelola Kegiatan Perguliran (UPKP) dipilih oleh ketua BKAD, adapun program yang dijalankan hanya sebatas PNPM Mandiri Perdesaan dengan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) merupakan bentuk lembaga kerja sama desa satu dengan desa lain dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah organisasi fungsional yang mengelola wilayah antar desa dalam satu kecamatan. BKAD merupakan lembaga yang dibentuk melalui kesepakatan antara setiap desa di kecamatan yang menjadi peserta PNPM-MPD. BKAD sendiri dibentuk dengan tujuan membangun kerja sama antara desa dalam rangka meningkatkan pembangunan serta pengembangan desa ke arah yang lebih baik. Lembaga ini berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota, untuk pengesahan serta penerbitan SK dari BKAD dikeluarkan serta ditandatangani secara langsung oleh bupati/wali kota. (Nurahman,2018)

Peran Badan Kerja Sama Antar Desa berhubungan langsung dengan masyarakat, yang juga terlibat dalam program PNPM Mandiri. Keberhasilan dari PNPM Mandiri Perdesaan sangatlah bergantung dari kerja sama lembaga penyelenggara (BKAD) dengan masyarakat, tanpa adanya kerja sama yang baik tentunya pemberdayaan yang diharapkan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Realisasi program PNPM Mandiri sangat bergantung kepada kinerja BKAD.

Program ini adalah salah satu fasilitas serta wadah pemberdayaan yang membantu kalangan perempuan dalam meningkatkan perekonomiannya. Hingga saat ini, kelompok simpan pinjam perempuan yang mengikuti program ini seperti di Kecamatan Permata. Kecamatan Permata itu sebuah kecamatan yang terdapat

di Kabupaten Bener Meriah, terdapat 27 desa/kampung yang berada di bawah kewenangan Kecamatan Permata.

Saat ini, program PNPM Mandiri yang dijalankan di Kecamatan Permata oleh BKAD sangat dikenal dan diapresiasi oleh kalangan masyarakat. Semenjak program PNPM Mandiri berhenti secara nasional dari tahun 2014, program PNPM Mandiri yang ditindaklanjuti oleh BKAD ini hanya menjalankan program simpan pinjam perempuan (SPP) termasuk di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian ini perlu dikaji oleh Antropologi disebabkan karena berkaitan erat dengan budaya kehidupan dalam masyarakat, serta terdapatnya tuntutan dan harapan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini berkaitan dengan paradigma fungsional dalam antropologi, Menurut paradigma fungsional, masyarakat adalah jaringan kelompok-kelompok yang saling terhubung yang berkolaborasi secara terstruktur dan membuat keputusan secara teratur berdasarkan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Program PNPM Mandiri sebagian besar dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (UPKP) dan Badan Tenaga Kerja Daerah (BKAD).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keberlanjutan Program Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan perguliran (UPKP) (Studi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1 Apa peran dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPKP) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan?
- 2 Bagaimana keberlanjutan Program PNPM Mandiri Pedesaan yang dikelola oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPKP) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui tentang peran dari Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPKP) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan.
2. Mengetahui tentang keberlanjutan Program PNPM Mandiri Pedesaan yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPKP) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan yang lebih mendalam sebagai acuan, referensi bagi pembaca mengenai keberlanjutan program simpan pinjam perempuan

PNPM Mandiri Perdesaan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Unit Pengelola Kegiatan (UPKP).

2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan akademik khususnya dalam kajian Program Studi Antropologi dengan pengkhususan fasilitator.

3 Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini guna pengembangan subkajian serta pembaharuan dari hasil penelitian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi serta wawasan baru bagi seluruh pembaca, khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. serta hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai rekomendasi kepada pemerintahan dalam membentuk program atau kebijakan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat khususnya di perdesaan.